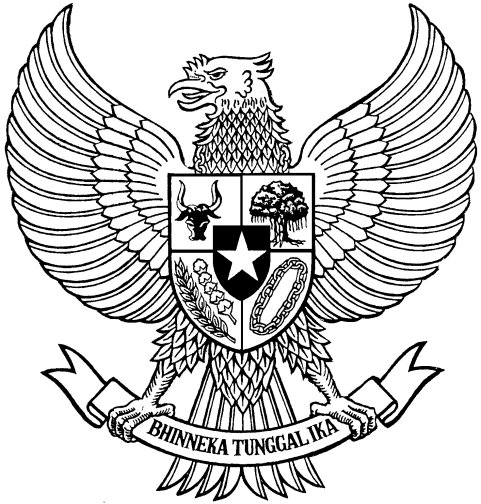
****

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI**

**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat :  Memperhatikan: | 1. bahwa untuk menjamin tertib dan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu disusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Menteri Pendayaguunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal;   Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Pembina pelayanan terpadu satu pintu adalah Bupati.
6. Penanggungjawab pelayanan terpadu satu pintu adalah Sekretaris Daerah.
7. Pelaksana pelayanan terpadu satu pintu adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Izin adalah dokumen yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya sesorang atau badan untuk melakukan suatu atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah.
15. Standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

1. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi pelaksana fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ini agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah.
3. Sasaran monitoring dan evaluasi adalah pencapaian penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik pada pelaksanan pelayanan terpadu satu pintu.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP DAN PRINSIP**

**Pasal 3**

1. Ruang lingkup mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu meliputi :
2. persiapan monitoring dan evaluasi;
3. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi; dan
4. pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
5. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, agar memperhatikan prinsip:
6. transparansi artinya metode dan hasil monitoring dan evaluasi harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
7. terukur artinya pelaksanaan penilaian memperhatikan ketersediaan data, informasi dan kelengkapan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam monitoring dan evaluasi;
8. obyektif artinya monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara profesional dan bebas dari kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
9. akuntabel artinya rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

**BAB IV**

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Persiapan**

**Pasal 4**

1. Untuk menjamin kualitas hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, maka Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari:
2. Sekretariat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Bappeda; dan
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
6. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, tim melakukan:
   1. rapat orientasi peran dan fungsi masing-masing dalam keanggotaan Tim sesuai dengan bidang monitoring satuan kerjanya untuk menjamin keselarasan dalam penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
   2. tim melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing;
   3. menyusun hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut;
   4. mereview hasil tindak lanjut atas rekomendasi monitoring dan evaluasi sebelumnya serta membahas sejumlah isu strategis yang terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; dan
   5. permasalahan diinventarisir untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi.

**Bagian Kedua**

**Pelaksanaan**

**Pasal 5**

1. Waktu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berkala per triwulan.
2. Komponen monitoring dan evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
3. kewenangan;
4. perencanaan dan komitmen;
5. organisasi dan tata laksana;
6. sumber daya manusia aparatur;
7. sarana dan prasarana;
8. sistem informasi;
9. sengelolaan pengaduan; dan
10. survey kepuasan masyarakat.
11. Matriks kerja monitoring dan evaluasi dari setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
12. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terpadu dengan menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut:
13. kuisioner;
14. wawancara;
15. observasi;
16. verifikasi; dan
17. pengawasan serta metode lainnya yang dipandang perlu.

**Bagian Ketiga**

**Pelaporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut**

**Pasal 6**

1. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam suatu laporan yang mengungkapkan data dan fakta terkait komponen monitoring dan evaluasi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
3. Permasalahan atau temuan hasil monitoring dan evaluasi serta saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan sebaik-baiknya.
4. Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada :
5. Wakil Bupati Polewali Mandar;
6. Staf Ahli Bupati;
7. Kepala SKPD pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
8. Satuan Kerja lainnya yang dipandang perlu dan terkait dengan rekomendasi tindak lanjut.

**BAB V**

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 7**

1. Pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati Polewali Mandar.
2. Pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
3. Pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu secara administrasi dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 16 Nopember 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 16 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 35